

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah memasuki era di mana orientasi pemerintah telah bergeser dari *Command and Control* menjadi orientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik, yang akhirnya membentuk otonomi daerah (Mardiasmo, 2002). Berbagai paket kebijakan sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan tentang ketika otonomi daerah mengelola daerahnya sendiri, prinsip otonomi harus digunakan secara merata, hal ini pasti akan membantu daerah mencapai kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. (Saputri, 2020).

Undang-Undang Pengelolaan Keuangan No. 13 Tahun 2006 yang ditetapkan oleh Permendagri membahas tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan pengawasan, serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu perwujudan dari otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi dimana daerah memiliki kuasa penuh atas urusan, tugas, dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan Otonomi Daerah.

Pemberian kewenangan otonomi ini bertujuan untuk mendorong daerah agar mampu melakukan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor jasa dan pekerjaan umum, juga pembangunan sarana dan prasarana publik. Pemerintah

daerah memiliki hak untuk mengembangkan kebijakan dan peraturannya sendiri untuk mengatur semua potensi dan sumber daya alam di daerahnya. Pendapatan asli daerah ialah sumber utama penghasilan pemerintah daerah yang berasal dari pajak serta retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Kemandirian daerah bisa diukur dengan meningkatkan pendapatan daerah setiap tahunnya. Oleh karena itu, PAD memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan kinerja keuangan daerah dan kemandirian daerah.

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan daerah dan membiayai pembangunan daerah serta pelayanan sosial yang disediakan buat masyarakat. Anggaran pendapatan serta belanja daerah ialah lingkup keuangan daerah dalam kewenangan daerah yang dibagi ke dalam tiga komponen yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah harus disampaikan setiap tahun, karena pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD masing-masing daerah dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan peraturan-peraturan pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah pembangunan yang menggunakan sumber daya lokal dan menyiapkan serta memenuhi segala kebutuhan daerah itu sendiri. Dengan pesatnya pembangunan daerah dapat menyebabkan peningkatan belanja daerah, oleh karena itu alokasi dana pembangunan dalam jumlah besar mutlak diperlukan. Besarnya Belanja daerah ditentukan oleh besarnya pendapatan daerah. Pemerintah daerah yang menerima

anggaran belanja bertanggung jawab untuk mendukung pertumbuhan belanja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Kinerja keuangan menjadi tolak ukur dalam pencapaian aspek keuangan antara lain adalah pendapatan dan belanja daerah, maka dari itu kinerja keuangan dapat tercermin dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan efisiensi belanja daerah. Pengukuran kinerja merupakan sarana untuk mempertahankan prestasi di berbagai pekerjaan dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Ukuran kinerja membantu pejabat pemerintah daerah menentukan seberapa baik tujuan mereka telah tercapai dan juga membantu masyarakat mengukur tingkat layanan pemerintah untuk melihat apakah layanan tersebut sepadan dengan biayanya (Djuniar & Zuraida, 2018).

Sistem pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai alat kontrol dalam suatu organisasi ketika pengukuran kinerja ditingkatkan dengan pembentukan *reward and punishment system*. Anggaran yang disiapkan berfungsi sebagai dasar perencanaan dan kriteria kinerja. Seiring dengan peran anggaran, kunci pelaksanaan yang efektif adalah bahwa tujuan anggaran dapat dicapai dan keterlibatan bawahan memainkan peran penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan organisasi (Apridiyanti, 2019).

Kinerja keuangan pemerintah bisa diukur dari seberapa besar keahlian pemerintah daerah dalam mendapatkan dan menggali potensi-potensi yang dipunya daerah tersebut sehingga sanggup memberikan kontribusi terhadap perkembangan pendapatan daerah tiap tahunnya (Antari & Sedana, 2018).

PAD dapat diartikan sebagai segala bentuk penerimaan yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah melalui pengelolaan sumber ekonomi yang dimiliki daerah. Sumber-sumber PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Secara keseluruhan, PAD memiliki potensi peningkatan yang sangat besar di setiap daerah di Indonesia, namun belum ada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD secara optimal. PAD yang belum optimal terutama kurangnya kapasitas daerah untuk mencari sumber-sumber PAD baru yang potensial, rendahnya kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, sistem administrasi dan kepemilikan pajak pemerintah daerah. Masih belum memadainya pemerintah daerah, serta sikap pemerintah daerah yang tidak optimis dengan hasil yang seharusnya dicapai daerah. Selain itu, penyebab lain yang menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan PAD di daerah adalah belum adanya sumber baru pajak dan retribusi daerah serta belum optimalnya pengelolaan aset daerah yang dapat menjadi sumber PAD baru.

Belanja Modal menjadi salah satu cara pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD mereka. Belanja modal yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh dan membangun properti pabrik dan peralatan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun yang dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Belanja modal juga dapat dikatakan sebagai investasi oleh pemerintah daerah yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan dan pendapatan di masa depan. Selain itu, belanja modal dapat diartikan sebagai

pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh modal yang dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.

Mahmudi (2010), menyatakan bahwa sumber keuangan daerah dibagi ke dalam dua macam, yaitu sumber pendanaan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber daerah yang berasal dari upaya pemerintah tertentu yang hasilnya akan dicapai dalam beberapa tahun. Upaya tersebut dapat berupa pembangunan infrastruktur yang merupakan bagian dari belanja modal.

Melalui belanja modal, Pemerintah Daerah akan memiliki aset tetap yang dapat digunakan untuk meningkatkan PAD. Dengan adanya penambahan aset tetap tersebut, akan diikuti dengan adanya potensi PAD yang bisa diperoleh daerah pada masa yang akan datang (Nugroho, 2018)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Antari dan Sedana (2018), memperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Leki, dkk (2018) memperoleh hasil yang menunjukkan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh yang positif tapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sebaliknya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Djuniar dan Zuraida (2018), memperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Dan penelitian yang dilakukan oleh Saputri, S. H (2020) menyatakan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh yang negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Peningkatan belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setiap tahun seharusnya diikuti dengan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber penerimaan daerah khususnya PAD. Peningkatan belanja modal dapat menjadi pendorong peningkatan penerimaan regional melalui penggunaan investasi yang optimal. Selain itu, investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat memberikan kontribusi yang kecil terhadap pembentukan PAD dan sumber lainnya untuk meningkatkan penerimaan daerah. Artinya bahwa belanja modal tidak dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam meningkatkan PAD dan menghasilkan sumber-sumber pendapatan yang baru bagi penerimaan daerah.

Masalah-masalah tersebut juga dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, dimana pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, dan tentu saja hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kinerja keuangan pemerintah daerahnya. Maka dari itu dalam penelitian ini penyusun ingin mengetahui bagaimana tingkat keefektifan kinerja keuangan daerah luwu timur setelah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan karena kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam menemukan sumber-sumber pendapatan yang baru dan tidak optimal dalam mengelola sumber-sumber pendapatan yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Luwu Timur.
- b. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Luwu Timur.
- c. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- b. Untuk mengetahui Pengaruh Belanja Modal kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- c. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk memperlajari pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan teori, khususnya yang berkaitan dengan Akuntansi Keuangan Daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah pusat dan daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pengembangan peningkatan PAD, sehingga kedepannya diharapkan konsep desentralisasi dapat segera terwujud. Bergantung pada pemerintah pusat, setidaknya bisa diminimalisir agar lebih mandiri.
- b. Memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan hasil penelitian ini.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas bahwa Tingkat Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebenarnya memiliki ruang lingkup yang cukup besar dan dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan

Ekonomi, Ukuran Legislatif, dan *Leverage* (Perbandingan antara utang dan modal), (Prabawa, 2009).

Namun, karena keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti, maka peneliti membatasi pada dua variabel saja, yakni variabel Pendapatan Asli Daerah dan variabel Belanja Modal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Akuntabilitas

Prinsip pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah salah satunya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, prinsip akuntansi pemerintahan, dan undang-undang. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, perubahan model pengelolaan pajak daerah harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan bukanlah tugas yang mudah bagi masyarakat (Mahmudi, 2010). Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan dan penganggaran pelaksanaan APBD, dan pengawasan pertanggungjawaban APBD.

Tingginya tuntutan dari publik terhadap *good governance* dan *clean governance* telah mendorong terselenggaranya dan berkembangnya sistem akuntabilitas yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan keuangan pemerintah harus berisi informasi yang dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai tanggung jawab pemerintah atas keputusan ekonomi, sosial dan ekonomi. Akuntabilitas didefinisikan sebagai hubungan antara mereka yang memegang kendali dan mereka yang dikendalikan. Untuk menjalankan sistemnya dibutuhkan pihak ketiga yang bertanggung jawab juga diharuskan untuk memberikan pernyataan

yang masuk akal tentang semya upaya dan hasil yang dicapai sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, tanggung jawab pemerintah tidak dapat dilihat tanpa pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat terkait pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat serta penggunaannya. (Faturahman, 2020).

Akuntabilitas bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Jika dilihat dari Sudut Pandang Akuntansi, *American Accounting Association* menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dapat dibagi ke dalam empat bagian, yaitu akuntabilitas terhadap :

- a. Sumber daya keuangan
- b. Patuh terhadap aturan hukum dan kebijakan administrasi
- c. Efisiensi operasional serta ekonomi
- d. Hasil program dan kegiatan pemerintah tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat, dan efektivitas.

Sementara jika dari Sudut pandang secara fungsional, akuntabilitas dilihat dalam lima fase yang berbeda, dimulai dengan fase yang membutuhkan tindakan yang lebih subjektif. Tahapannya adalah sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas berdasarkan kejujuran dan legalitas

Berkenaan dengan akuntabilitas penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang disetujui berdasarkan hukum yang berlaku (*compliance*)

b. Akuntabilitas Proses

Berkenaan dengan proses, prosedur atau tindakan untuk melaksanakan kegiatan tertentu (*planning, allocating and managing*).

c. Akuntabilitas Kinerja

Tingkat ini memeriksa bahwa kegiatan dilakukan secara efisien dan ekonomis (*efficient and economy*).

d. Program Akuntabilitas

Menekankan pada penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (*outcomes and effectiveness*).

e. Akuntabilitas Kebijakan

Dalam tahap ini ada beberapapilih dari kebijakan yang akan diterapkan atau tidak (*value*).

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi penerimaan dari daerah, yang dihubungkan bersama untuk mendanai kegiatan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pemerintah daerah memungut pajak daerah dan biaya tambahan sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah. Dalam peraturan pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah pada tahun anggaran dianggap sebagai hak daerah yang diakui selain kekayaan bersih. Sedangkan dalam UU No. 33 Tahun 2004 dikatakan bahwa PAD adalah pendapatan yang diterima oleh daerah dan dipungut dari pajak atau tidak sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang.

Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, karena Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi terbesar bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah. Semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin kecil ketergantungan daerah terhadap dukungan pemerintah pusat yang berbasis otonomi daerah, yang akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan.

Pertumbuhan pendapatan daerah mengalami kenaikan atau penurunan tergantung dari seberapa besar sumber-sumber keuangan daerah mampu menghasilkan pendapatan bagi daerahnya. Penerimaan pendapatan daerah merupakan terpenting dari daerah karena digunakan untuk mendanai semua program yang direncanakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah. Dalam Undang-Undang Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan daerah yang sumbernya dari beberapa komponen yang diharapkan mampu menambah nilai kekayaan bersih daerah.

Pertumbuhan pendapatan daerah ditentukan oleh sejauh mana sumber daya keuangan mampu memberikan pendapatan bagi daerah itu sendiri. Kemampuan menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki daerah secara optimal akan mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Sejalan dengan penerapan otonomi daerah, dapat memungkinkan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan daerah untuk meminimalkan ketergantungan pada bantuan keuangan pusat. Sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli

daerah adalah pendapatan daerah berdasarkan peraturan daerah yang berlaku sebagai kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah (Apridiyanti, 2019).

Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah yang tinggi setiap tahunnya menunjukkan pula tingginya sumber keuangan yang dimiliki daerah. Potensi-potensi yang dimiliki daerah diharapkan mampu dimanfaatkan dengan baik agar sumber keuangan yang bersumber dari pendapatan asli daerah dapat meningkat. Tuntutan agar pemerintah daerah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah disebabkan karena saat ini kewenangan pemerintah pusat lebih banyak dilimpahkan kepada daerah.

PAD hendaknya didukung dengan upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Eksploitasi PAD yang berlebihan hanya akan membebani masyarakat, akan menyurutkan daerah dan dapat mengancam perekonomian secara makro. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa PAD adalah sejumlah uang yang diterima selama satu tahun dari masyarakat/sumber di daerahnya sendiri untuk mendanai segala pengeluaran, baik untuk biaya rutin maupun biaya pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian Antari (2018) yang menemukan bahwa peningkatan pendapatan hasil daerah dapat menjadi penyebab peningkatan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri semua kegiatan daerahnya. Hal ini memberikan indikasi bahwa pemerintah daerah telah melakukan kinerja dengan baik. Hasil penerimaan Pendapatan Asli

Daerah dari berbagai sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah berupa penerimaan pajak, retribusi, dan pendapatan lain yang sah yang diatur dalam undang-undang dan dapat menimbulkan peningkatan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Nastiti, AR (2020) dan Saputri SH (2020) juga menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa PAD dikelompokkan menjadi empat jenis pendapatan (Mahmudi, 2009:16), yaitu :

- a. Pajak daerah, yaitu pungutan yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan dengan pertauran daerah. Hak ini wajib untuk semua orang atau perusahaan dan benda bergerak atau tidak bergerak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dll.
- b. Retribusi daerah, sebagai imbalan/penggunaan jasa daerah atau pajak daerah adalah pajak yang digabungkan dengan pelayanan atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata, seperti pajak atas pelayanan kesehatan, pajak persampahan/kebersihan, biaya komersial, pembuangan limbah cair, dll.
- c. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu kewenangan daerah yang bersumber dari pengelolaan dana khusus daerah, termasuk bagian keuntungan dari penyertaan dalam pemberian modal kepada perusahaan daerah/BUMD, bagian dari keuntungan dari penyertaan dalam penyediaan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Negara/BUMN, bagian dari

manfaat melalui penyertaan modal sosial di perusahaan swasta atau kelompok usaha masyarakat.

- d. Penerimaan dari Lain-lain PAD yang sah, yaitu pendapatan daerah yang berasal dari aset pemerintah daerah lainnya, seperti pendapatan dari penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dll.

2.1.3 Belanja Modal

Dalam Permenkeu No. 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran belanja modal, menyangkut pengeluaran untuk perolehan aset atau peningkatan nilai aset tetap atau aset lain yang memberikan keuntungan. Selama lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas kapitalisasi minimum untuk aset tetap atau aset lainnya. Menurut Mardiasmo (2009) dalam Mulia (2016:32), belanja modal adalah belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi anggaran dan yang selanjutnya meningkatkan aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya meningkatkan pengeluaran rutin, seperti biaya pemeliharaan untuk kelompok menjadi biaya administrasi dan umum. Jenis belanja pada kelompok ini meliputi belanja aparatur daerah dan pelayanan publik.(Djuniar & Zuraida, 2018)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa penanaman modal adalah kewajiban daerah berupa pengeluaran yang diakui layak untuk mengurangi nilai kekayaan bersih dalam suatu tahun anggaran guna memenuhi kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana.

Belanja modal dibedakan menjadi belanja modal dan belanja berulang pada layanan komunitas sosial, pengeluaran untuk administrasi dan pengeluaran pada pelayanan ekonomi. *Keynesian teory* menyatakan bahwa belanja modal yang dilakukan pemerintah dapat berfungsi sebagai suatu kebijakan ekonomi yang akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian di suatu daerah. Pendapat ini sesuai dengan penelitian Ayden et al. (2016), yang menemukan hasil bahwa jika belanja publik berada di atas ambang batas, maka hal ini dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapat ini juga sejalan dengan hasil penelitian Amuka dkk. (2016), yang menyatakan bahwa belanja publik dapat membawa stabilitas di tingkat ekonomi (Azis, 2020)

Belanja modal merupakan bagian dari belanja publik yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Belanja modal merupakan salah satu kegiatan belanja pemerintah daerah yang diharapkan mampu meningkatkan aktiva tetap dan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Ayinde (2015) dan Badrudin (2011) mengungkapkan bahwa kegiatan belanja modal juga ditujukan untuk membiayai proyek-proyek yang diharapkan menjadi pendorong dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Thalib, 2019).

1. Peran Belanja Modal

Belanja modal adalah bagian dari belanja daerah yang digunakan sebagai indikator produktivitas berdasarkan penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah sehubungan dengan pembelian, perolehan dan pengembangan aset tetap dan lainnya, baik untuk kemudahan penyebaran. Fungsi pemerintahan dan

peningkatan fasilitas umum. Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa belanja modal dalam rangka perolehan/pengambilalihan atau pengembangan aset berwujud dengan nilai pakai lebih dari satu tahun dihabiskan untuk kegiatan pemerintah. Seperti tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan struktur, jalan, irigasi dan jaringan dan aset berwujud lainnya. (Lathifa, 2019).

2. Jenis-Jenis Belanja Modal

Belanja modal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Negara, yang telah diperbarui dan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, investasi dibagi menjadi lima kategori utama (Pembangunan et al., 2018), yaitu:

- a. Tanah; yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dan siap digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah.
- b. Peralatan dan mesin; seperti mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat-alat elektronik dan semua persediaan kantor dan alat-alat lain yang bernilai cukup besar dan dengan masa manfaat lebih dari dua belas bulan dan dalam keadaan baik.
- c. Gedung dan bangunan; mencakup semua bangunan dan bangunan yang telah diperoleh untuk digunakan dalam operasi untuk digunakan dalam operasi milik negara dan dalam kondisi siap pakai.
- d. Jalan, irigasi, dan jaringan; aset yang dimiliki/dikuasai negara berupa jalan, irigasi dan jaringan siap pakai.

- e. Aset tetap lainnya; termasuk aset tetap yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan digunakan untuk operasional pemerintah dan siap pakai dengan umur simpan lebih dari satu tahun.

2.1.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sejauh mana kegiatan keuangan daerah, termasuk pendapatan dan belanja daerah telah dilakukan dengan menggunakan indikator keuangan yang ditentukan oleh ketentuan politik atau hukum untuk suatu periode anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kinerja merupakan tujuandari program atau kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Jika output yang diperoleh lebih besardaripada input, maka meningkat taraf efisiensi suatu organisasi (Andirfa et al, 2016). Sedangkan kinerja keuangan daerah adalah taraf capaian menurut suatu output kerja dibidang keuangan wilayah menggunakan indikator-indikator keuangan yang sudah ditetapkan sebelumnya menggunakan tujuan buat mengetahui suatu wilayah pada mengelola keuangannya(Saputri, 2020).

Peningkatan kinerja keuangan pemerintah wilayah hanya akan berdampak dalam kesejahteraan masyarakat, dimana semakin besar kemampuan suatu daerah dalam menggali potensi-potensi daerah untuk membiayai jalannya sistem pemerintahan dan pembangunan daerah, serta digunakan untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik. Menurut Mardiasmo (2018:151) menyatakan bahwa tujuan berdasarkan pengukuran kinerja keuangan penda untuk memenuhi tiga tujuan, yaitu: pertama, membantu pemerintah untuk tetap fokus dalam tujuan dan target kerja. Kedua, menjadi asal pengalokasin daya dan pengambilan keputusan. Ketiga, menjadi pertanggungjawaban pada rakyat dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

1. Tujuan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah

Tujuan sistem pengukuran kinerja adalah (Asmaul, 2016:87) :

- a. Untuk mengkomunikasikan strategi menjadi lebih baik.
- b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang supaya bisa ditelusuri perkembangannya menggunakan strategi.
- c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah sekaligus buat menjadi motivasidalam mencapai Keselarasan Tujuan.
- d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan yang dari pendekatan dan kemampuan individual dan kemampuan kerja sama yang rasional.
- e. Dari pendapat dia atas, maka bisa disimpulkan bahwa tujuan menurut pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu mencari cara buat mempertahankan prestasi pemerintah daerah, selain itu mengkomunikasikan secara baik latar belakang Pemda, mengukur kinerja finansial dan non-finansial, mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer dan buat mencapai keselarasan tujuan dan alat buat mencapai kepuasan.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Daerah

Menurut Mardiasmo (2009) faktor yang mempengaruhi kinerja daerah yaitu *outputs* dan *inputs*, maka semakin besar *outputs* dibanding *inputs*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi, maka proksi pengukuran kinerja pemerintah daerah untuk digunakan dengan rumus efisiensi dan diukur dengan rasio *outputs* dengan *inputs*. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah yaitu *input* dan *output*. Yang mana *input* adalah sumber daya yang digunakan untuk kebijakan, program dan aktivitas dapat berupa pendapatan/penerimaan suatu daerah. sedangkan *output* adalah hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas dan kebijakan seperti belanja modal dan penilaian kinerja daerah.

3. Indikator Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah

Penilaian Kinerja Keuangan Pemda harus meliputi segala pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini berhubungan dengan tujuan organisasi Pemerintah Daerah Menurut Mahsun (2013:196) (Pratiwi, 2018).

Indikator Kinerja Keuangan Pemda meliputi :

- a. Indikator masukan (*inputs*) adalah semua yang diperlukan supaya pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk menghasilkan keluaran.
- b. Indikator Proses (Process) adalah perumusan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

- c. Indikator keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat diperoleh/dicapai dari suatu kegiatan, baik kegiatan yang berupa kegiatan fisik maupun non fisik.
- d. Indikator hasil (*outcomes*) adalah semua hal yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
- e. Indikator manfaat (*benefit*) adalah sebagai sesuatu yang terkait menggunakan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- f. Indikator dampak (*impacts*) merupakan imbas yang ada dampak baik positif juga negatif terhadap taraf indikator yang sudah ditetapkan.

4. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pada tahun 2009 Mardiasmo menyatakan bahwa, “Dalam mengukur Kinerja dalam sektor publik (instansi pemerintah daerah) merupakan sistem yang mempunyai tujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu taktik melalui alat ukur finansial dan nonfinansial”. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu penilaian untuk mengetahui bagaimana pencapaian kinerja dari suatu organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system* (sistem penghargaan dan hukuman).

Menurut Mardiasmo (2009:123) evaluasi kinerja keuangan diukur dengan anggaran yang sudah dibuat. Penilaian kinerja memiliki tujuan untuk menilai varian (selisih dan perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varian secara umum berfokus pada (a) varian pendapatan (*revenue variance*) dan (b) varian pengeluaran (*expenditure variance*) yang terdiri atas

varian belanja rutin (*recurrent expenditure variance*), dan varian belanja investasi/modal (*capital expenditure variance*).

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu (Mardiasmo, 2009: 121):

- 1) Memperbaiki Kinerja Pemda.
- 2) Membantu proses pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Mewujudkan sifat pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemda memakai analisis rasio keuangan terhadap laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil analisis rasio keuangan kemudian dipakai untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengukur upaya pemerintah daerah untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah. Menurut Halim (2007) mengemukakan bahwa pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan pemerintahan, membangun, dan pelayanan masyarakat seharusnya menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dan Sisa Anggaran Lebih Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Djuniar, Zuraida (2018)	Metode Asosiatif	Variabel Dependen: Kinerja Pemerintah Daerah Independen: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.	Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. SILPA berpengaruh negative terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
2	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Nasiti, A.R.	Metode Dokumentasi	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.	Pendapatan Asli Daerah, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan

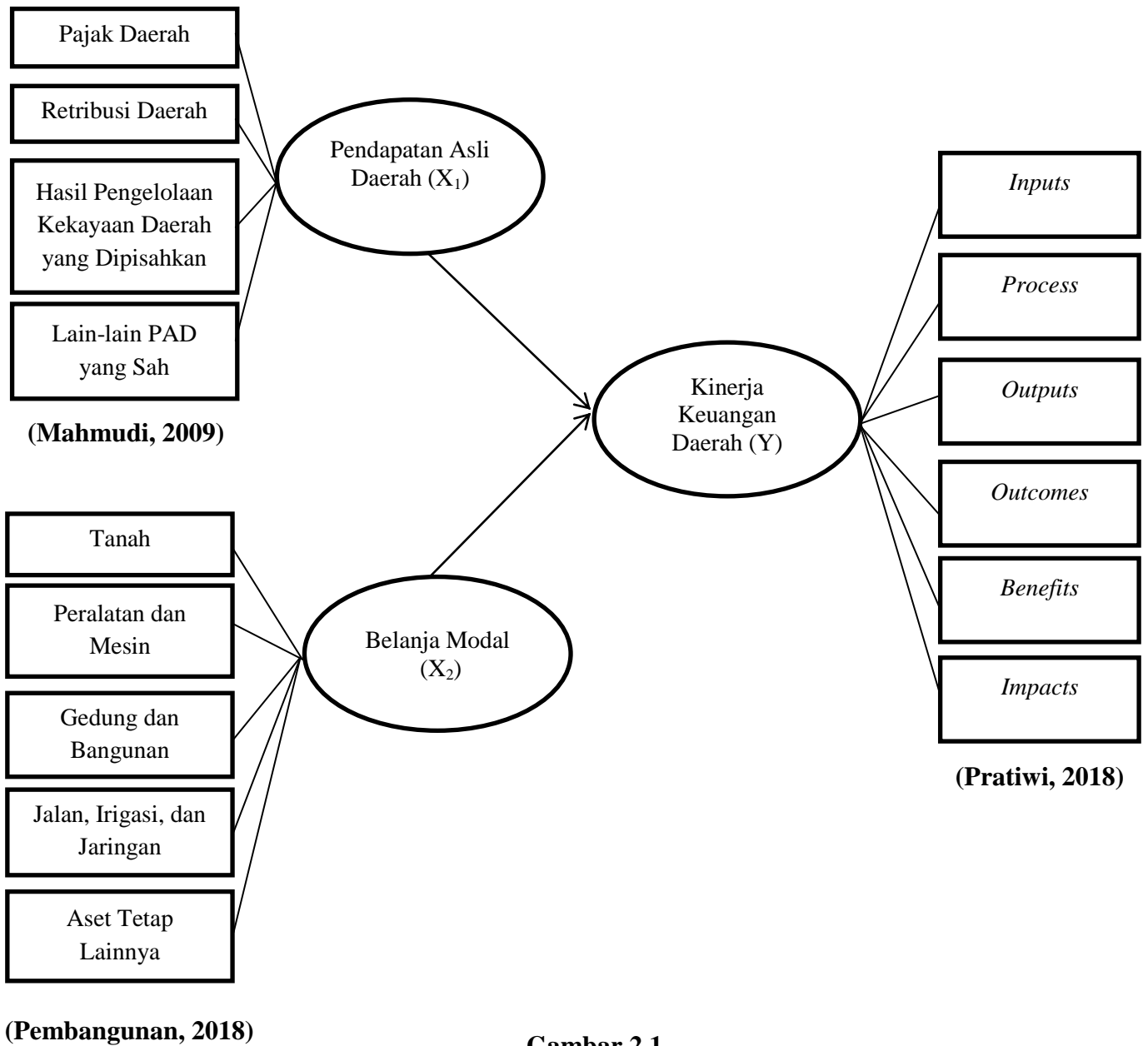
	(2020)			Pemerintah Daerah.
3	Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Saputri, S.H. (2020)	Metode Pendekatan Kuantitatif	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Independen: Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Belanja Daerah berpengaruh negative terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.
4	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Thalib. F (2019)	Metode Pendekatan Kuantitatif	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negative terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Belanja Modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
5	Pengaruh	Metode	Variabel	Terdapat hubungan

	Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Azis, M.I (2020)	Analisis Regresi Data Panel	Dependen: Pendapatan Asli Daerah Independen: Belanja Modal	berbanding lurus antara Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD akan merespon positif dan signifikan terhadap perubahan yang terjadi pada belanja modal.
6	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Fatmawati, T.O (2020)	Pendekatan Metode Kuantitatif	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Umum berpengaruh negative terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Khusus berpengaruh negative terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
7	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja	Pendekatan Metode Kuantitatif	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Independen: Pendapatan Asli Daerah dan	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Belanja Modal

	Keuangan. Leki, Dkk. (2018)		Belanja Modal	berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.
8	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Lathifa dan Haryanto (2019)	Metode Analisis Regresi Linier Berganda	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Belanja Modal Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
9	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Antari dan Sedana (2018)	Pendekatan Kuantitatif bersifat asosiatif	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal.	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah.
10	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi	Pendekatan Kuantitatif	Variabel Dependen: Belanja Modal. Independen:	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja

	Umum Terhadap Belanja Modal. Todingan, N. J. A (2017)		Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum.	Modal. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.
--	--	--	---	--

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang akan diuji kebenarannya melalui riset, selain itu Hipotesis juga digunakan untuk menguji hubungan antar variabel dependen dan variabel independen yang mendasar pada kajian pustaka, landasan teori dan latar belakang (Suliyanto, 2009:53). Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang berdasarkan pada pungutan-pungutan yang dilakukan oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta karena perolehan jasa yang diberikan pemerintah daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat menjalankan pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam undang-undang.

Besarnya PAD dapat menjadi ukuran dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, karena semakin besar angka PAD juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mendayagunakan sumber daya dan potensi yang ada pada wewenangnya. Pendapatan asli daerah menjadi faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro. Pertumbuhan yang positif mendorong peningkatan perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik dan diikuti investasi yang tinggi disuatu daerah akan meningkatkan PAD Pemda tersebut (Mustikarini dan Fitriyasari, 2012). Berdasarkan teori di atas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1 : Diduga Pendapatan Asli Daerah secara signifikan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

2. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pembelian dan pembangunan aset tetap yang mempunyai nilai manfaat lebih dari satu periode. Memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang manfaatnya dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Tingkat Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dilaksanakan. Semakin banyaknya pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kinerja daerah akan lebih baik. Astiti dan Mimba (2016) menyatakan bahwa jika proses pengalokasian dana untuk pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah bertambah banyak maka akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, dengan adanya infrastruktur yang baik dapat menciptakan efisiensi di berbagai sector dan produktivitas masyarakat semakin meningkat (Andirfa, 2016). Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut (Lathifa, 2019):

H2 : Diduga Belanja Modal berpengaruh secara signifikan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, dengan memberikan gambaran di masa sekarang (di masa lalu) dan di masa yang akan datang. Yang merupakan penelitian yang menjelaskan tentang gejala peristiwa kejadian yang terjadi. Penelitian ini memusatkan pada fenomena yang sedang terjadi pada saat penelitian ini dilakukan.

Metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016:86).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah dari bulan April – Juli 2021.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek/subyek penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian digunakan sebagai bahan untuk membuat kesimpulan (Sugiyono, 2016:88).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Laporan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi dari penelitian (Kuncoro, 2009:122). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2020.

Dalam metode penelitian ini, teknik pengambilan data yang digunakan adalah teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016).

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang digunakan dan diterbitkan oleh organisasi yang bukan pengelolanya (Suliyanto, 2009). Dalam penelitian ini data sekunder diambil dari Laporan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2020.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu instrumen pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data (Kriyantono, 2006:120). Pengumpulan data dalam penelitian ini berasal dari informasi yang

didapatkan melalui jurnal, artikel, penelitian terdahulu dan Laporan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 2014-2020.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1 Variabel Dependen (Variabel terikat/tergantung)

Istilah lainnya adalah variabel terikat/tergantung. Variabel dependen atau variabel terikat/tergantung merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, (Sanusi, 2011:50). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kinerja Pemerintah Daerah.

3.6.2 Variabel Independen (Variabel tidak terikat/bebas)

Istilah lainnya adalah variabel tidak terikat/bebas. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain (Sanusi, 2011:50). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah X_1 (Pendapatan Asli Daerah), X_2 (Belanja Modal).

3.6.3 Definisi Operasional Variabel

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pelaksanaan penelitian ini, maka perlu diberikan definisi variabel operasional yang akan diteliti. Definisi operasional adalah hasil dari pengoperasionalan konsep ke dalam elemen-elemen yang dapat di observasi yang menyebabkan konsep dapat diukur dan dioperasionalkan dalam konsep.

1) Pendapatan Asli Daerah (X_1)

Pendapatan Asli Daerah adalah akumulasi dari penerimaan pajak yang bersumber dari dalam daerah yang saling berhubungan guna untuk membiayai kegiatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

2) Belanja Modal (X_2)

Belanja daerah/modal adalah kewajiban daerah berupa pengeluaran yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran untuk memenuhi kebutuhan daerah terhadap sarana dan prasarana pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

3) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator-indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua metode pengujian, yaitu Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari (a) Uji Normalitas, (b) Uji Multikolinearitas, (c) Uji Heteroskedastisitas. Dan Pengujian Hipotesis yang terdiri dari (a) Uji Hipotesis secara Simultan (Uji F), (b) Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t), (c) Uji Koefisien Determinasi (*R-Square*).

3.8 Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa kuantitatif untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja

Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan Teknik Analisis Pertumbuhan (*Trend*), sebagai berikut:

a. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Pertumbuhan PAD Thn t =	$\frac{\text{PAD Thn t} - \text{PAD Thn (t-1)}}{\text{PAD Thn (t-1)}} \times 100\%$
----------------------------	---

Analisis Pertumbuhan Pendapatan suatu daerah pastinya diharapkan pertumbuhan pendapatan yang positif dan kecenderungannya meningkat (*trend*). Sebaliknya jika malah terjadi pertumbuhan yang negatif maka hal itu menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan dan harus dicari penyebab penurunannya, apakah karena faktor ekonomi makro yang diluar kendali pemerintah daerah atau karena manajemen keuangan daerah yang kurang baik.

Pemerintah daerah juga harus memperhitungkan tingkat inflasi yang bisa saja terjadi. Jika misalnya peningkatan pendapatan lebih rendah dari tingkat inflasi, maka pemerintah daerah harus menggunakan jalan lain yaitu dengan melakukan efisiensi belanja secara ketat, jika tidak maka kinerja keuangan daerah akan merosot. Selain mempertimbangkan faktor inflasi, penetapan target dari pertumbuhan pendapatan juga harus mempertimbangkan asumsi anggaran yang lain, misalnya kurs rupiah, harga minyak, dan sebagainya, (Mahmudi, 2019:137).

b. Analisis Pertumbuhan Belanja Modal

$$\text{Pertumbuhan Belanja Modal Thn } t = \frac{\text{Belanja Modal Thn } t - \text{Belanja Modal Thn } (t-1)}{\text{Belanja Modal Thn } (t-1)} \times 100\%$$

Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja yang telah dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan bisa dipertanggungjawabkan. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka waktu menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah (Mahmudi, 2019:158).

c. Analisis Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas PAD/Realisasi Penerimaan PAD/Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Target Penerimaan PAD/Belanja Modal}} \times 100\%$$

Analisis Efektivitas dilakukan untuk mengukur tingkat ketercapaian target yang ditetapkan. Kita dapat mengevaluasi tingkat efektivitas operasional keuangan pemerintah dengan cara membandingkan informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Operasional dengan proyeksinya. Proyeksi laporan keuangan dapat dilihat dari laporan keuangan proformanya. Adapun kisaran nilai capaian kinerja untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan keuangan dapat ditentukan standarnya oleh pemerintah (Mahmudi, 2019:190), seperti:

1. 100% ke atas = Sangat Efektif
2. 85% - 100% = Efektif
3. 75% - 84% = Cukup Efektif
4. 75% ke bawah = Tidak Efektif

Selanjutnya diuji menggunakan alat bantu program statistik E-Views. Dalam penelitian model analisis, data hasil analisis dengan menggunakan teknik analisis pertumbuhan dan analisis efektivitas digunakan untuk menguji sejauh mana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan model analisis regresi linier berganda.

Regresi linier berganda adalah dalam suatu persamaan regresi terdapat satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen (Algifari 2011:61). Penelitian ini menjelaskan pengaruh antara satu variabel dependen/terikat (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah) dengan beberapa variabel independen/bebas (Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal).

Menurut Hakim (2007:274) Model Regresi Linier berganda mempunyai beberapa variabel independen sehingga secara umum bentuk fungsinya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon_i$$

Keterangan :

Y : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

α : Konstanta

β_1 - β_2 : Koefisien Regresi

- X_1 : Pendapatan Asli Daerah
- X_2 : Belanja Modal
- ϵ_i : Variabel pengganggu atau faktor-faktor di luar variabel yang tidak dimasukkan sebagai variabel model di atas (kesalahan residual).

3.8.1 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependet dan independet terdistribusi secara normal atau tidak. Salah satu cara untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan Uji Jarque-Berra (Uji J-B). Hasil yang diperhatikan dari uji ini adalah nilai probability.

Jika nilai probability lebih besar dari nilai α (0.05) maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji regresi berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai probability lebih kecil dari nilai α maka dapat disimpulkan bahwa hasil regresi terdistribusi tidak normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah pengujian dari asumsi klasik untuk membuktikan bahwa variabel-variabel bebas dalam suatu model tidak memiliki korelasi satu dengan lainnya. Gejala multikolinieritas juga dapat dideteksi dengan melihat besarnya nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Indikasi multikolinieritas pada umumnya terjadi jika VIF lebih dari 10, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas lainnya.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya perbedaan varians terhadap model regresi yang digunakan. Jika varians pada model regresi memiliki kesamaan maka disebut homoskedastisitas. Yang diharapkan daripada pengujian ini adalah model yang digunakan tidak terdapat heteroskedastisitas melainkan homoskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi muncul apabila observasi yang berurutan sepanjang waktu dan berkaitan satu sama lain. Untuk menguji adanya autokorelasi dapat dideteksi dengan Uji Durbin-Watson test. Pengujian yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengujian pada nilai Durbin-Watson (D-W) untuk mendeteksi adanya korelasi dalam setiap model. Apabila nilai Durbin-Watson statistik terletak -2 sampai dengan +2 maka tidak terdapat adanya gejala autokorelasi dengan *level of significant* yang digunakan dalam penelitian adalah 5%.

3.8.2 Pengujian Hipotesis

a. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersamaan atau simultan terhadap variabel dependen.

Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dan F tabel, menghitung nilai F statistik dengan rumus:

$$F \text{ hitung} = \frac{R^2 / k - 1}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Dimana :

R^2 = Koefisien Determinasi

k = Jumlah variabel independen ditambah intercept dari suatu model persamaan

n = Jumlah Sampel

Hipotesis :

$H_0 : H_0 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 = 0$

$H_a : H_a : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 \neq 0$

H_0 diterima jika $F\text{-Hitung} > F\text{-Tabel}$

H_a diterima jika $F\text{-Hitung} > F\text{-Tabel}$

b. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel dependen lainnya konstan. Dalam hal ini hipotesis yang digunakan adalah :

$$H_0 = b_i = b$$

$$H_a = b_i \neq b$$

Dimana b_i merupakan koefisien variabel independen ke-I nilai parameter hipotesis, biasanya b dianggap = 0, artinya tidak ada pengaruh variabel X_1 terhadap Y . bilai $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka pada tingkat kepercayaan tertentu H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel independen yang diuji berpengaruh secara nyata (signifikan terhadap variabel dependen).

Nilai $t\text{-hitung}$ diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$T - hitung = \frac{b_i - b}{S_{b_i}}$$

Dimana :

b_i = Koefisien variabel ke-1

b = nilai hipotesis 0

S_{b_i} = simpangan baku dari variabel independen ke-1

c. Koefisien Determinasi (R-Square)

Koefisien determinasi pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dengan kata lain :

- Jika $0 \geq R^2$, maka antara variabel independen dengan variabel dependen tidak ada keterkaitan.
- Jika $0 \leq R^2$, maka antara variabel independen dengan variabel dependen ada keterkaitan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu timur adalah kabupaten baru sebagai pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara. Keinginan masyarakat di wilayah eks Onder-afdeling Malili atau bekas Kewedanaan Malili, untuk membentuk suatu daerah otonom sendiri telah terwujud. Kabupaten Luwu Timur yang terbentang dari Kecamatan Burau di sebelah barat hingga Kecamatan Towuti di Sebelah Timur, membujur dari Kecamatan Mangkutana di sebelah utara hingga Kecamatan Malili di sebelah selatan, diresmikan berdiri pada tanggal 3 Mei 2003 (Harmawati, 2016).

Semangat pembentukan kabupaten Luwu Timur berawal pada tahun 1959, dimana pada waktu itu situasi ketentraman dan keamanan pada hampir seluruh kawasan sangat mencekam dan memprihatinkan akibat aksi para gerombolan pemberontak yang membunuh banyak tempat, termasuk kota Malili. Peristiwa ini, secara langsung melahirkan semangat heroisme yang membara, khususnya dikalangan para pemuda pada waktu itu, untuk berjuang keras dengan tujuan membangun kembali wilayah eks Kewedanaan Malili yang porak poranda. Gagasan pembentukan kabupaten pun merebak dan diperjuangkan secara bersungguh-sungguh. Sebagai dasar utamanya, secara sangat jelas termasuk dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (LN. 1959 Nomor 74 TLN Nomor 1822) yang mengamanatkan bahwa semua Daerah Eks Onder-Afdeling di Sulawesi Selatan,

termasuk di antaranya bekas Kewedanaan Malili akan ditingkatkan statusnya menjadi kabupaten.

Namun dengan berbagai pertimbangan dan alasan tertentu, kabupaten ini baru resmi terbentuk pada tahun 2003, yaitu berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2002 tanggal 24 Mei 2002, tentang persetujuan usul pemekaran Luwu Utara. Gubernur Sulawesi Selatan menindaklanjuti dengan mengusulkan pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 130/2172/Otoda tanggal 30 Mei 2002. Akhirnya, aspirasi perjuangan masyarakat luwu timur yang diperjuangkan selama 44 tahun telah mencapai titik kulminasi yaitu atas persetujuan bersama DPR dan Presiden setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003, tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 3 Mei 2003 telah meresmikan sekaligus melantik pejabat Bupati Luwu Timur di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.

Kemudian pada tanggal 12 Mei 2003, sebagai penanda mulai berlangsungnya aktivitas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur yang baru terbentuk itu, maka Bupati Luwu Utara dan Pejabat Bupati Luwu Timur secara bersama-sama meresmikan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur yang ditandai dengan pembukaan selubung papan nama perbatasan bertempat di Desa Lauwo antara

Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dan Kecamatan Bone-Bone Kabupaten luwu Utara. Pada hari yang sama dilakukan prosesi penyerahan operasional pemerintahan dari pemeritah Kabupaten Luwu Utara kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bertempat di lapangan Andi Nyiwi, Malili.

Dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur yang merupakan hasil pemekaran dari kabupaten luwu utara maka secara administratif kabupaten luwu timur berdiri sendiri sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Namun secara kultural, historis dan hubungan emosional sebagai satu maupun keluarga Tanah Luwu tetap terjalin sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.

4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur

Visi kabupaten Luwu Timur yaitu “Luwu Timur Terkemuka 2021”. Misi kabupaten Luwu Timur untuk mencapai visi tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakatnya yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya.
- b. Mendorong peningkatan investasi daerah.
- c. Memanfaatkan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- d. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dalam mencapai kualitas manusia yang tinggi.

- e. Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah.
- f. Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik.
- g. Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama.
- h. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar daerah.

4.1.3 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur

Diusianya yang terbilang masih belia, Luwu Timur yang berjuluk Bumi Batara Guru ini mengalami banyak kemajuan disegala bidang. Capaian pertumbuhan ekonomi secara nasional dalam skala mikro dan makro, menunjukkan bahwa pembangunan telah mendorong pertumbuhan ekonomi secara sinergis dan menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Prioritas pembangunan yang mengarah pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian dalam arti luas dan infrastruktur menunjukkan bahwa komitmen pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam percepatan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan prinsip yang adil dan merata. Luwu Timur memiliki potensi pengembangan dan pertumbuhan yang prospektif di masa datang karena karakteristik khusus yang dimilikinya sebagai wilayah yang memiliki potensi kekayaan sumber daya alam. Sehingga secara alamiah, Kabupaten Luwu Timur memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Luwu Timur tahun 2019, Luwu Timur memiliki penduduk yang berjumlah 300.374 jiwa. Kabupaten Luwu

Timur juga terdiri dari 11 kecamatan yakni kecamatan Malili, Angkona, Tomoni, Tomoni Timur, Kalena, Towuti, Nuha, Wasuponda, Wotu, Burau dan Mangkutana.

Secara geografis kabupaten luwu timur terletak di sebelah selatan khatulistiwa. Tepatnya dia antara 2⁰03'00" – 3⁰03'25" Lintang Selatan dan 119⁰28'56" – 121⁰47'27" Bujur Timur, dengan luas wilayah 6.944,88 km². Sekitar 11,14% Provinsi Sulawesi Selatan merupakan luas wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Kabupaten Luwu Timur menjadi Kabupaten yang terletak paling timur di Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara. Sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone. Sementara itu, batas sebelah Barat merupakan Kabupaten Luwu Utara.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Data Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Luwu Timur

Tabel 4.1 PAD dan Belanja Modal 2014-2020

Tahun	PAD	Belanja Modal
2014	Rp 134,350,836,071.47	Rp 319,357,074,415.65
2015	Rp 155,962,924,866.74	Rp 385,079,325,803.85
2016	Rp 177.018.897.819,76	Rp 501.965.376.065,35
2017	Rp 254.902.886.906,53	Rp 394.196.882.764,70
2018	Rp 264.769.982.685,12	Rp 424.442.870.689,57
2019	Rp 313.564.038.877,42	Rp 337.387.395.159,43
2020	Rp 340.369.274.279,45	Rp 236.966.048.167,05

Sumber: Kantor BPKAD Luwu Timur, 2021

Pada tabel 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu tujuh tahun yaitu dari Tahun 2014 sampai 2020, Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur mengalami kecenderungan *Trend* meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk Belanja Modal mengalami *Trend* yang semakin menurun. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang cukup baik dari tahun ke tahun ini menandakan bahwa Luwu Timur memiliki pengelolaan sumber Pendapatan yang baik, hal tersebut dapat dilihat pada kenaikan Pendapatan Asli Daerah yang cukup signifikan pada tahun 2020 yakni sebesar Rp340.369.274.279,45. Dan untuk Pertumbuhan Belanja Modal mengalami penurunan yang sangat signifikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seperti pada tahun 2014 belanja modal adalah sebesar Rp 319.357.074.415,65, kemudian tahun selanjutnya mengalami kenaikan. Dan untuk tahun 2016 mengalami kenaikan yang sangat baik dimana belanja modal bernilai Rp 501.965.376.065,35. Penurunan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2020 dimana anggaran belanja modal pada tahun 2020 hanya sebesar Rp236.966.048.167,05 yang berarti merupakan penerimaan belanja modal yang paling rendah dalam kurun waktu tujuh tahun.

4.2.2 Analisis Data Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Pertumbuhan PAD Thn } t = \frac{\text{PAD Thn } t - \text{PAD Thn } (t-1)}{\text{PAD Thn } (t-1)} \times 100\%$$

Tabel 4.2 Analisis Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	PAD Thn (t) (Rp)	PAD Thn (t-1) (Rp)	Pertumbuhan (Rp)
2014	134,350,836,071.47	126,468,298,003.15	6.23%
2015	155,962,924,866.74	134,350,836,071.47	16.09%
2016	177,018,897,819.76	155,962,924,866.74	13.50%
2017	254,902,886,906.53	177,018,897,819.76	44.00%
2018	264,769,982,685.12	254,902,886,906.53	5.57%
2019	313,564,038,877.42	264,769,982,685.12	18.43%
2020	340,369,274,279.45	313,564,038,877.42	8.55%
	Rata-Rata		16.05%

Sumber: Kantor BPKAD Luwu Timur, 2021

Pada tabel 4.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2014 sampai 2020 mengalami pertumbuhan yang tidak menentu, seperti pada tahun 2014 pertumbuhan PAD hanya meningkat sebesar 6.23% atau 7.882.538.068,32 dari tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 16.09% atau sebesar 21.612.088.795,3 yang kebanyakan bersumber dari Lain-lain pendapatan yang sah. Pada tahun 2016 PAD mengalami pertumbuhan sebesar 13.50% atau sebesar 21.055.972.953,02. Sedangkan pada tahun 2017 terjadi peningkatan Pendapatan

Asli Daerah yang cukup ekstrem yakni sebesar 44% atau meningkat sebanyak 77.883.989.086,8 dari tahun sebelumnya, peningkatan pertumbuhan pada tahun 2017 yang cukup ekstrem ini disebabkan oleh peningkatan pajak daerah dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kemudian pada tahun 2018 PAD mengalami pertumbuhan sebesar 5.57% atau hanya bertambah 9.867.095.755,59 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 PAD kembali mengalami peningkatan dalam pertumbuhannya yakni sebesar 18.43% atau 48.794.056.192,30 dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2020 PAD hanya mengalami pertumbuhan sebanyak 8.55% atau 26.805.000.000 dari tahun 2019. Adapun rata-rata pertumbuhan PAD kabupaten Luwu Timur selama tujuh tahun dari tahun 2014-2020 adalah 16.05%.

4.2.3 Analisis Data Belanja Modal

$$\text{Pertumbuhan Belanja Modal Thn } t = \frac{\text{Belanja Modal Thn } t - \text{Belanja Modal Thn } (t-1)}{\text{Belanja Modal Thn } (t-1)} \times 100\%$$

Tabel 4.3 Analisis Pertumbuhan Belanja Modal

Tahun	Belanja Modal Thn (t)	Belanja Modal (t-1)	Pertumbuhan (%)
2014	319,357,074,415.65	224,827,472,094.00	42.05%
2015	385,079,325,803.85	319,357,074,415.65	20.58%
2016	501,965,376,065.35	385,079,325,803.85	30.35%
2017	394,196,882,764.70	501,965,376,065.35	-21.47%
2018	424,442,870,689.57	394,196,882,764.70	3.87%
2019	337,387,395,159.43	424,442,870,689.57	-20.51%

2020	236,966,048,167.05	337,387,395,159.43	-29.76%
Rata-Rata			3.59%

Sumber: Kantor BPKAD Luwu Timur, 2021

Pada Tabel 4.3 di atas, dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Belanja Modal Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2014-2020 mengalami Kecenderungan /Trend yang semakin menurun dan bahkan ada tahun yang tidak mengalami pertumbuhan Belanja Modal sama sekali seperti tahun 2017, 2019, dan 2020. Untuk tahun 2014 Belanja Modal mengalami pertumbuhan yang sangat baik yakni 42.05% atau meningkat sebanyak 94.529.602.321,65 dari tahun sebelumnya. Tahun 2015 Belanja Modal juga mengalami pertumbuhan yang baik yaitu sebesar 20.58% atau 65.722.251.388,20 dari pada tahun 2014. Tahun 2015 Belanja Modal kembali mengalami pertumbuhan yang sangat baik yakni 30.35% atau bertumbuh sebesar 65.722.251.388,20. Sedangkan, pada tahun 2017 Belanja Modal tidak mengalami pertumbuhan sama sekali dan malah mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -21,47% atau menurun sebesar 107.768.493.300,65 dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh penerimaan dari belanja modal gedung dan bangunan juga belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan mengalami penurunan yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan Belanja Modal tahun 2017. Untuk tahun 2018 Belanja Modal kembali mengalami kenaikan pertumbuhan yang tidak terlalu signifikan yaitu hanya sebesar 3.87% atau bertumbuh sebesar 30.245.987.924,87. Adapun Pertumbuhan Belanja Modal yang tidak mengalami pertumbuhan juga terjadi pada tahun 2019 yakni menurun sebesar -20.51% dan 2020 juga menurun sebesar -29.76%, hal ini disebabkan oleh

penerimaan Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, juga Belanja Modal jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tahun tersebut tidak optimal dan menurun semakin jauh dari tahun sebelumnya. Hal ini bisa saja disebabkan oleh kurang optimalnya kinerja karyawan daerah dalam mengelola penerimaan dari sumber-sumber tersebut. Adapun rata-rata pertumbuhan dari belanja modal adalah sebesar 3.59%, pertumbuhan yang sangat rendah tersebut diakibatkan oleh penerimaan belanja modal selama tujuh tahun tidak mengalami *trend* yang meningkat.

4.2.4 Analisis Data Kinerja Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas PAD Realisasi Penerimaan PAD/Belanja Modal} / \text{Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD/Belanja Modal}} \times 100\%$$

Tabel 4.4 Analisis Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi Penerimaan	Target Penerimaan	Efektivitas PAD (%)	Keterangan
2014	134,350,836,071.47	141,754,000,599.00	94.78%	Efektif
2015	155,962,924,866.74	147,078,305,324.71	106.04%	Sangat Efektif
2016	177,018,897,819.76	179,381,613,179.00	98.68%	Efektif
2017	254,902,886,906.53	239,917,615,778.00	106.25%	Sangat Efektif
2018	264,769,982,685.12	268,593,347,297.00	98.58%	Efektif
2019	313,564,038,877.42	305,909,940,590.23	102.5%	Sangat Efektif
2020	340,369,274,279.45	302,243,641,026.13	112.61%	Sangat Efektif
Rata-rata			102.77%	Sangat Efektif

Sumber: Kantor BPKAD Luwu Timur, 2021

Pada Tabel 4.4 di atas memperlihatkan persentase keefektian PAD Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2014 sampai 2020, yang merupakan hasil perbandingan antara realisasi PAD dan Target PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil Kabupaten Luwu Timur. Tabel 4.4 menunjukkan bahwa rasio efektivitas penerimaan PAD di Luwu Timur tahun anggaran 2014-2020 berfluktuasi atau berkisar antara 94.78% sampai dengan 112.61%. Hal ini menunjukkan bahwa selama tujuh tahun anggaran pemungutan dianggap PAD telah efektif karena kontribusi yang diberikan terhadap target yang telah ditetapkan berkisar diangka 100%. Pada tahun 2014 rasio efektivitas PAD sebesar 94.78% yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan sudah efektif karena rasio efektifitas lebih dari 90%. Efektifitas pemungutan PAD ini berasal dari komponen-komponen PAD yang direalisasikan hampir mencapai target yang telah ditentukan.

Pada tahun 2015 rasio efektifitas PAD Luwu Timur adalah sebesar 106.04%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, efektifitas PAD mengalami peningkatan sebesar 11.26% yang berasal dari peningkatan Pajak Daerah dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah dan hal ini menjadikan Kinerja keuangan Pemda pada tahun 2015 masuk kategori sangat efektif. Tahun 2016 menurun sebesar 7.36% yaitu hanya 98.68% yang disebabkan oleh menurunnya Retribusi Daerah dari tahun sebelumnya tapi masih masuk kategori efektif. Pada tahun 2017 kinerja keuangan kembali masuk kategori sangat efektif karena berada pada kategori sangat efektif karena efektifitas PAD berada pada nilai 106.25%. Tahun 2018 efektifitas PAD kembali mengalami penurunan kinerja tapi masih

dalam kategori efektif karena berada dikisaran 85-100% yakni 98.58%. Sedangkan untuk tahun 2019 dan 2020 efektifitas PAD sangat efektif karena ada di kisaran lebih dari 100% yakni 102.5% dan 112.61%. Bahkan rata-rata dari Efektivitas kinerja penerimaan PAD ada di kisaran 100% ke atas, yang berarti sangat efektif.

Tabel 4.5 Analisis Kinerja Penerimaan Belanja Modal

Tahun	Realisasi Penerimaan	Target Penerimaan	Efektivitas Belanja Modal (%)	Keterangan
2014	319,357,074,415.65	438,100,854,490.00	72.90%	Tidak Efektif
2015	385,079,325,803.85	482,420,215,926.55	79.82%	Cukup Efektif
2016	501,965,376,065.35	608,955,155,625.00	82.43%	Cukup Efektif
2017	394,196,882,764.70	448,830,060,710.00	87.83%	Efektif
2018	424,442,870,689.57	465,032,476,756.54	91.27%	Efektif
2019	337,387,395,159.43	374,145,684,017.94	90.18%	Efektif
2020	236,966,048,167.05	250,621,309,513.35	94.55%	Efektif
Rata-rata			85.57%	Efektif

Sumber: Kantor BPKAD Luwu Timur, 2021

Tabel 4.5 di atas menunjukkan keefektifisan penerimaan Belanja Daerah dari tahun 2014-2020 dengan rata-rata nilainya berkisar antara 85% sampai 100% yakni sebesar 85.57% yang berarti efektif, namun pada tahun 2014 tingkat efektifisan Belanja Modal berada dikisaran 74% ke bawah yakni hanya 72.90% yang berarti tidak efektif yang disebabkan oleh rendahnya penerimaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. Tahun 2015 dan 2016 tingkat keefektifisan

kinerja penerimaan Belanja Modal mengalami peningkatan hingga masuk dalam kategori cukup efektif dengan nilai masing-masing sebesar 79.82% dan 82.43%. Sedangkan untuk tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 mengalami peningkatan keefektifisan yang cukup baik karena efektifitas belanja modal memasuki kategori efektif yang berarti nilainya berada dikisaran 85% sampai 100% dengan nilai masing-masing tahun yaitu 87.83%, 91.27%, 90.18%, dan 94.55% yang disebabkan oleh penerimaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan yang semakin membaik dari tahun ke tahun.

4.2.5 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif secara umum digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (*mean*), dan nilai standar deviasi. Data yang diolah merupakan data laporan keuangan BPKAD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Periode Tahun 2014-2020 yang sesuai dengan variabelnya yaitu Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Kinerja Keuangan dengan menggunakan aplikasi E-Views 10. Berdasarkan analisis statistik deskriptif diperoleh gambaran sampel sebagai berikut:

Tabel 4.6 Statistik Deskriptif dari Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Kinerja Keuangan

Variabel	Min	Max	Mean	Standar Deviasi
Kinerja Keuangan	83.84000	103.5800	94.17429	6.101229
Pendapatan Asli Daerah	5.570000	44.00000	16.05286	13.26577
Belanja Modal	-29.76000	42.05000	3.587143	28.29913

Sumber: Hasil Olah *Software Eviews 10, 2021*

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, dapat dijelaskan bahwa :

1. Nilai minimum dari Kinerja Keuangan adalah 83.84, sementara nilai maksimum dari Kinerja Keuangan adalah 103.58. Nilai rata-rata dari Kinerja Keuangan adalah 94.17429, sementara nilai standar deviasi dari Kinerja Keuangan adalah 6.101229.
2. Nilai minimum dari Pendapatan Asli Daerah adalah 5.57, sementara nilai maksimum dari Pendapatan Asli Daerah adalah 44.00. Nilai rata-rata dari Pendapatan Asli Daerah adalah 16.05286, sementara nilai standar deviasi dari Pendapatan Asli Daerah adalah 13.26577
3. Nilai minimum dari Belanja Modal adalah -29.76, sementara nilai maksimum dari Belanja Modal adalah 42.05. Nilai rata-rata dari Belanja Modal adalah 3.587143, sementara nilai standar deviasi dari Belanja Modal adalah 28.29913.

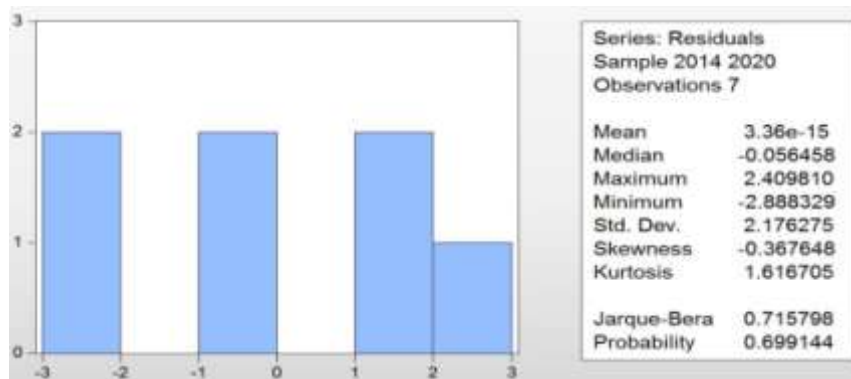
4.2.6 Uji Asumsi Klasik

4.2.6.1 Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas terhadap residual dengan menggunakan uji Jarque-Bera (J-B). Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan adalah $\alpha = 0,05$. Dasar pengambilan keputusan adalah melihat angka probabilitas dari statistik J-B, dengan ketentuan sebagai berikut.

Jika nilai probabilitas $\geq 0,05$, maka asumsi normalitas terpenuhi.

Jika probabilitas $\leq 0,05$, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.



Sumber: Hasil Olah *Software Eviews* 10, 2021

Gambar 4.1 Uji Normalitas

Perhatikan Gambar 4.1, diketahui bahwa nilai probabilitas dari statistik J-B adalah 0.699144. Karena nilai probabilitas p , yakni 0,699144, lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikansi, yaitu 0,05. Hal ini berarti asumsi normalitas dipenuhi.

4.2.6.2 Uji Multikolinearitas

Dalam penelitian ini, gejala multikolinearitas dapat dilihat dari nilai korelasi antar variabel yang terdapat dalam matriks korelasi. Mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat sebagai berikut.

Jika nilai *Centered VIF* ≥ 10 maka asumsi multikolinearitas ditolak.

Jika nilai *Centered VIF* ≤ 10 maka asumsi multikolinearitas diterima.

Variance Inflation Factors
Date: 05/22/21 Time: 02:37
Sample: 2014 2020
Included observations: 7

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	3.340707	3.291682	NA
PAD	0.008206	3.303205	1.219620
BELANJA_MODAL	0.001803	1.242483	1.219620

Sumber : Hasil Olah *Software Eviews* 10, 2021

Gambar 4.2 Uji Multikolinearitas

Berdasarkan tabel 4.2 hasil pengujian multikolinearitas di atas, dengan melihat nilai *Centered VIF* ≤ 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas pada penelitian ini.

4.2.6.3 Uji Autokorelasi

Asumsi mengenai independensi terhadap residual (non-autokorelasi) dapat diuji menggunakan uji Durbin-Watson. Nilai statistik dari uji Durbin-Watson berkisar antara 0 dan 4. Nilai statistik dari uji Durbin-Watson yang lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 3 diindikasikan telah terjadi autokorelasi.

Log likelihood	-14.83634	Hannan-Quinn criter.	4.809581
F-statistic	13.71945	Durbin-Watson stat	2.112109

Sumber: Hasil Olah *Software Eviews* 10, 2021

Gambar 4.3 Uji Autokorelasi

Berdasarkan Gambar 4.3 Uji Autokorelasi, hasil dari statistik Durbin-Watson adalah 2.112109. Perhatikan bahwa nilai statistik Durbin-Watson terletak di antara 1 dan 3, yakni $1 < 2.112109 < 3$, maka asumsi non-autokorelasi

terpenuhi. Dengan kata lain, tidak terjadi gejala autokorelasi yang tinggi pada residual.

4.2.6.4 Uji Heteroskedastisitas

Pendeteksian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji glejser.

Berikut hasil uji Glejser.

Heteroskedasticity Test: Glejser			
F-statistic	0.498201	Prob. F(2,4)	0.6409
Obs*R-squared	1.395967	Prob. Chi-Square(2)	0.4976

Sumber: Hasil Olah *Software Eviews* 10, 2021

Gambar 4.4 Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Berdasarkan Gambar 4.4 Uji Heteroskedastisitas di atas dengan melihat nilai *Prob Obs*R-Squared* sebesar 0.4976 dimana lebih besar dari nilai $\alpha = 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau data dalam penelitian ini telah memenuhi syarat homokedastisitas.

4.2.3 Pengujian Hipotesis

Pada pengujian hipotesis, akan dilakukan analisis koefisien determinasi, pengujian pengaruh simultan (Uji F), dan pengujian pengaruh parsial (Uji t), sebagai berikut:

Dependent Variable: KINERJA
Method: Least Squares
Date: 05/22/21 Time: 03:18
Sample: 2014 2020
Included observations: 7

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	96.28178	1.827760	52.67747	0.0000
PAD	-0.083274	0.090587	-0.919271	0.4100
BELANJA_MODAL	-0.214855	0.042464	-5.059676	0.0072
R-squared	0.872769	Mean dependent var		94.17429
Adjusted R-squared	0.809154	S.D. dependent var		6.101229
S.E. of regression	2.665381	Akaike info criterion		5.096098
Sum squared resid	28.41703	Schwarz criterion		5.072917
Log likelihood	-14.83634	Hannan-Quinn criter.		4.809581
F-statistic	13.71945	Durbin-Watson stat		2.112109
Prob(F-statistic)	0.016188			

Sumber: Hasil Olah *Software Eviews* 10, 2021

Gambar 4.5 Nilai Statistik Dari Koefisien Determinasi, Uji F, Dan Uji t

4.2.4 Analisis Koefisien Determinasi

Berdasarkan Gambar 4.5, diketahui nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-Squared*) sebesar $R^2 = 0.809154$. nilai tersebut dapat diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal mampu mempengaruhi dan menjelaskan Kinerja Keuangan secara simultan atau bersama-sama sebesar 80.91%, sisanya sebesar 19.09% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

4.2.5 Uji Signifikansi Pengaruh Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Berdasarkan Gambar 4.5, diketahui nilai *Prob. (F-statistics)*, yakni $0.016188 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas, yakni Pendapatan Asli Daerah

dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh positif terhadap variabel Kinerja Keuangan.

4.2.6 Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh variabel independen secara individual atau parsial terhadap variabel dependen. Berdasarkan gambar 4.5 di atas, menunjukkan bahwa kedua variabel independen yang dimasukkan dalam model ternyata memiliki perbedaan, hal ini dapat dilihat pada nilai probabilitas signifikansi dari variabel pad di atas 0,05 yaitu 0.4100 yang berarti variabel pad tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan untuk variabel belanja modal memiliki nilai probabilitas signifikansi di bawah 0.05 yaitu 0.0072 yang berarti variabel belanja modal berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.2.7 Persamaan Regresi Linear Berganda

Berdasarkan Gambar 4.5, diperoleh persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = 96.28178 - 0.083274X1 - 0.214855X2$$

Berdasarkan gambar 4.5, diketahui :

1. Nilai konstanta (α) sebesar 96.28178 artinya jika variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Belanja Modal (X2) dianggap 0 (nol) atau diabaikan maka perubahan penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Luwu Timur adalah sebesar 96.28178.

2. Nilai koefisien b_1 variabel Pendapatan Asli Daerah adalah -0.083274 , yakni bernilai negatif yang artinya korelasi antara kedua variabel tersebut berlawanan dimana penurunan nilai X akan dibarengi dengan peningkatan Y. Hal ini berarti setiap penurunan Pendapatan Asli Daerah sebesar -0.083274 akan meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Luwu Timur sebesar 0.083274 , dengan asumsi bahwa variabel lain sama dengan 0 (nol).
3. Nilai koefisien b_2 variabel Belanja Modal adalah -0.214855 , yakni bernilai negatif yang artinya korelasi antara kedua variabel tersebut berlawanan dimana penurunan nilai X akan dibarengi dengan peningkatan Y. Hal ini berarti setiap penurunan Belanja Modal sebesar -0.214855 akan meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Luwu Timur sebesar 0.214855 , dengan asumsi bahwa variabel lain sama dengan 0 (nol).

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui berbagai pengujian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel independen dan variabel dependen adalah sebagai berikut:

4.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan pengujian statistik terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi dari variabel Pendapatan Asli Daerah adalah -0.0832 , yakni bernilai negatif. Hal ini berarti Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan. Diketahui nilai Prob adalah 0.4100 yakni $>$ tingkat signifikansi 0.05 , maka Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Dari hasil tersebut,

menunjukkan bahwa hipotesis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan telah ditolak atau Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Artinya setiap perubahan variabel Pendapatan Asli Daerah, maka secara statistik tidak mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah daerah.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa baik atau buruknya kinerja keuangan suatu daerah dapat ditentukan dari pendapatan yang diterima oleh daerah tersebut. Sebagai contoh, PAD yang diterima pada tahun 2014 dengan nilai minimum yakni sebesar Rp 134,350,836,071.47 dengan tingkat keefektifan kerjanya sebesar 94.78% (Efektif), yang merupakan PAD paling rendah selama tujuh tahun. Sedangkan PAD yang paling tinggi diterima pada tahun 2020 yakni sebesar Rp 340.369.274.279,45 dengan tingkat keefektifan kerjanya sebesar 112.61% (Sangat Efektif), yang merupakan satu-satunya penerimaan PAD yang paling tinggi yang diterima oleh Luwu Timur selama tujuh tahun, hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah maka dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Leki, Dkk (2018) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Thalib. F (2019) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

4.3.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan pengujian statistik terhadap variabel Belanja Modal di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi dari variabel Belanja Modal adalah -0.2148, yakni bernilai negatif. Hal ini berarti Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan. Diketahui nilai Prob adalah 0.0072 yakni < tingkat signifikansi 0.05, maka Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah telah diterima atau Belanja Modal berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil ini menunjukkan bahwa kenyataan Pemerintah Daerah dengan semakin meningkatnya alokasi belanja modal, maka semakin tinggi kinerja keuangan daerah Luwu Timur. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan tersedianya infrastruktur yang baik dapat menciptakan efisiensi diberbagai sektor dan produktivitas masyarakat menjadi semakin tinggi dan pada akhirnya dapat mempengaruhi peningkatan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat daerah Luwu Timur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Antari dan Sedana (2018), yang menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Untuk hasil analisis kinerja keuangan Pendapatan Asli Daerah memiliki rata-rata nilai di atas 100% yang menunjukkan bahwa kinerja pendapatan asli daerah masuk dalam kategori sangat efektif. Sedangkan untuk Belanja Modal memiliki rata-rata analisis kinerja keuangan sebesar 85.57% yang berarti masuk dalam kategori Efektif.
- b. Berdasarkan hasil uji parsial (Uji-t), Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan tidaksignifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sehingga hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal, dimana Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Luwu Timur.
- c. Berdasarkan hasil uji parsial (Uji-t), Belanja Modal berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Sehingga hasil ini sesuai dengan hipotesis awal, dimana Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Luwu Timur.
- d. Berdasarkan hasil uji simultan (Uji-F), Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Luwu Timur.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti selanjutnya agar menambah beberapa variabel dan memperbanyak objek penelitian agar sampel yang diperoleh juga lebih banyak dan data yang didapatkan menjadi lebih akurat dan menghasilkan hasil pengujian data yang lebih baik.
- b. Pembahasan yang berkaitan dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sangatlah luas, namun pada penelitian ini permasalahan hanya dianalisis secara kuantitatif. Untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hal tersebut akan lebih rinci jika dilakukan dengan analisis kualitatif.
- c. Bagi Kabupaten Luwu Timur
 1. Dalam hal peningkatan PAD, Pemda harus lebih giat menggali lebih banyak sumber-sumber pendapatan yang potensial bagi daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi.
 2. Pemda harus tegas pada masyarakat yang tidak taat bayar pajak, hal ini dimaksudkan agardirasakannya keadilan bagi masyarakat.
 3. Pemda harus memperbaiki dan memberikan fasilitas lebih baik kepada BUMD yangtelah didirikan agar laba yang dihasilkan dapat meningkat.